SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA KAMPUNG BARU PADUSUNAN KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

SUMATERA BARAT

IERSITAS ISLAMA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mempe<mark>rol</mark>eh Gelar <mark>S</mark>arjana Pada Fakultas Ekonomi Universita Islam Riau



Oleh:

DESRI NURMITA SARI 155310479

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

lamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan elp.(0761) 674681 Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: DESRI NURMITA SARI NAMA

MINERSITAS 1955310479 NPM

EKONOMI FAKULTAS

AKUNTANSI-SI JURUSAN

Keuangan Pada Akuntansi Baru Padusunan Analisis Penerapan Kampung JUDUL SKRIPSI

Pemerintahan Desa Pariaman Kota Timur Pariaman Kecamatan

Sumatera Barat.

Disahkan Oleh:

PENBIMBING I

Yusra wati, SE. M. Si

Mengetahui:

DEKAN

Drs. H. Abrar, M.Si., AK., CA

KETUA PRODI AKUNTANSI SI

An

Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., AK., CA

ABSTRAK

ANALISI PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA KAMPUNG BARU PADUSUNAN KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN SUMATERA BARAT

Oleh:

DESRI NURMITA SARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi keuangan pada pemerintahan Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Sumatera Barat telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui, penulis berupaya memperoleh data-data yang terkait berupa: Buku Kas Umum Tunai, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Selanjutnya data-data yang telah dipeloreh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mengumpulkan data untuk menjelaskan situasi dan kondisi di lapangan, serta dibandingkan dengan teori-teori yang mendukung pembahasan dengan data-data yang penulis peroleh, kemudian diambil satu kesimpulan yang merupakan pemecahan masalah yang dihadapi.

Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis ditemui masalah yaitu penerapan akuntansi yang dilakukan Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Sumatera Barat belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sehingga dari hasil penelitian penulis memberikan masukan, saran, serta solusi kepada desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur agar kedepannya pelaksanaan penyusunan laporan keuangan desa susuai dengan prisip akuntansi berterima umum.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING
IN THE GOVERNMENT OF KAMPUNG BARU VILLAGE, PADUSUNAN
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN WEST SUMATERA

By:

DESRI NURMITA SARI

The purpose of this study was to determine the application of financial accounting in the village government of Kampung Baru Padusunan, East Pariaman District, Pariaman City, West Sumatra in accordance with General Accepted Accounting Principles.

Based on the problems encountered, the author seeks to obtain related data in the form of: General Cash Cash Book, Tax Assistant Cash Book, Village Bank Book, Report on Realization of the Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget, and Report on Village Assets. Furthermore, the data collected was analyzed using descriptive methods, namely analyzing data by collecting data to explain the situation and conditions in the field, and compared with theories that support the discussion with the data that the author obtained, then taken one the conclusion which is the solution to the problem at hand.

From the data analysis conducted by the writer, there was a problem, namely the application of accounting by Kampung Baru Padusunan Village, East Pariaman Subdistrict, Pariaman City, West Sumatra, which was not in accordance with generally accepted accounting principles. So from the results of the study the authors provide input, suggestions, and solutions to the village of Kampung Baru Padusunan, East Pariaman District so that in the future the implementation of the dairy village financial report preparation with generally acceptable accounting principles.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Pemerintahan Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Sumuatera Bara". Shalawat dan salam kita untukkan Nabi Muhammad SAW.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Terselesainya laporan penelitian ini tidak lepas dari campur tangan banyak pihak yang telah membantu. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor universitas Islam Riau yang memberikan kesempatan besar kepada penulis untuk bisa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya di Universitas Islam Riau.
- 2. Bapak Drs. Abrar. M.Si.,Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis sehingga penulis dapat belajar dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 3. Ibu Drs. Eny Wahyuningsih. M.Si., AK., Ca selaku Ketua Jurusan Progmam Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- 4. Ibuk Yusrawati SE., M.Si selaku dosen pembimbing , yang mana dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis bangyak dibantu serta melapangkan waktu, tenaga dan perhatiannya dalam memberikan motivasi dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

- 5. Bapak dan Ibu desen Fakultas Ekonomi yang tidak dapat disebut satu persatu namanya yang telaih mandidik dan membimbing penulis tanpa mengenal lelah selam duduk dibangku perkuliahan.
- 6. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan semangat, dukungan serta mendoakan penulis hingga saat ini, serta abang Riko, bang Rido dan kakak ipar yang selalu mensuport penulis.
- 7. Untuk sahabat-sahabatku Siti Fatimah, Putri Aprila, dan Suci Wulandari yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama bimbingan, memberikan semangat, serta motivasi kepada penulis untuk lebih semangat dalam menyelesaika skripsi.
- 8. Semua pihak yang tidak bisa disebut namanya satu persatu yang telah mambantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis buat jauh dari kata sempurna., namun penulis berharap skripsi yang telah penulis buat dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, 09 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR	ii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	8
A. T <mark>el</mark> aa <mark>h Pu</mark> staka	
1. Pengertian Desa	8
Pengertian Akuntansi Akuntansi Pemerintahan	10
3. Akuntansi Pemerintahan	11
4. Akuntansi Desa	12
5. Siklus <mark>Akun</mark> tansi	14
6. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi	18
a. Sistem Pencatatan	18
b. Dasar Pengakuan Akuntansi	19
7. Pengelolaan Keuangan Desa	19
B. Hipotesis	26

LAMPIRAN

BAB III : METODE PENELITIAN22	7
A. Lokasi / Objek Penelitian	7
B. Jenis Dan Sumber Data	7
C. Metode Pengumpulan Data	7
D. Teknik Analisis Data2	8
BAB VI : GAMBARAN UMUM DESA2	9
A. Sejarah Singkat Desa	9
B. Demografi Desa29	9
C. Kondisi Pemerintahan Desa	2
D. Visi dan Misi Desa	9
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN42	2
A. Dasar Pengakuan Akuntansi	2
B. Siklus Akuntansi	2
C. Penyajian Laporan Keuangan5	5
BAB VI : PENUTUP	8
A. Kesimpulan5	58
B. Saran5	59
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL IV.1	30
TABEL IV.2	30
TABEL IV.3	30
TABEL IV.5	31
TABEL IV.5	33
TABEL V.1	45
TABEL V.2	46
TABEL V.3	47
TABEL V.4	47
TABEL V.5	48
TABEL V.6	48
TABEL V.7	49
TABEL V.8	50
TABEL V.9	55
TABEL V.10	57

DAFTAR GAMBAR



BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Perhatian mengenai Desa di indonesia akhir-akhir ini semakinmeningkat.

Dikarenakan desa diberikan wewenag untuk mengatur penatausahaan keuangannya sendiri yang telah diatur dalam peraturan undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

Menurut peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelengaraan pemerintah desa. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasanya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Menginggat besar dana yang dikelola pemerintah desa, perlu adanya standar pelaporan pemerintah desa yang bisa digunakan pemerintah desa sebagai acuan untuk membuat laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada stakeholder seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat.

Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktivitas instansi dapat dijalankan dengan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Akuntansi merupakan sistem informasi yang mencatat kejadian di masa lalu yang menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang berguna untuk pihak internal dan eksternal untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Menurut Suradi (2009 : 2) pengertian akuntansi adalah; Suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan pristiwa – pristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pihak yang berkepentingan.

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, di buktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pengertian keuangan desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu di atur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Rangkaian dan asas pengelolaan keuanangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat terwujud.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak dipemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa seperti tokoh desa dan tokoh agama perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 93 ayat (1) pengelolaan Keauangan Desa adalah :

"Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa."

Menurut IAI-KASP (2015;12-13) tahapan siklus akuntansi terbagi menjadi beberapa tahap. Pertama, tahap pencatatan yaitu suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti yang disusun kedalam buku harian atau Jurnal Umum. Kedua, tahap penggolongan yaitu tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah di catat dan di nilai kedalam debit dan kredit. Ketiga tahap penghiktisaran, pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja.

Selanjutnya tahap Keempat, yaitupelaporan, tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu sebagai berikut : a.) Membuat laporan pertangggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdesa. Laporan ini berisi jumlah anggran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutanuntuk tahun

anggaran tertentu. b.) Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Desa Kampung Baru Padusunan terletak dikecamatan Pariaman timur Kota Pariaman.Penulis tertarik meneliti di Desa Kampung Baru Padusunan dikarenakan beberapa tahun terakhir perkembangan di Desa Kampung Baru Padusunan semakin pesat dilihat dari bantuan pemerintah dalam bidang pertanian sangat membantu masyarakat petani dengan memberikan bibit unggul sehingga hasil dari pertanian dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan insfrastruktur jalan dan bangunanya juga semakin bagus. Desa Kampung Baru Padusunan merupakan salah satu desa yang juga diharuskan untuk melaporkan keuangan desanya pada pemerintahan, pada tahun 2017 pendapatan desanya sebesar Rp. 1.690.838.480 sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.709.217.455.

Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman menggunakan *Chas Basis*, yaitu transaksi dicatatat pada saat penerimaan kas atau pada saat mengeluarkan kas. Adapun proses akuntansi yang dilakukan Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman dimulai dari transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas dicatat diBuku Kas Umum-Tunai (Lampiran 3) yang digunakan untuk mencatat peneriamaan dan pengeluaran kas, Buku Bank Desa (Lampiran 4) yang digunakan untuk semua penerimaan dan pengeluaran yang berhungan dengan uang Bank, selanjutnya Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran

5) yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak yang di lakukan oleh bendahara desa.

Setelah dilakukan proses penatausahaan pada akhir priode Desa Kampung Baru Padusunan juga membuat laporan keuangan desa yang berupa laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapan dan Belanja Desa (Lampiran 2) yang berisi tentang pendapan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang akan dibandingkan dengan anggarannya sesuai APBDesa perubahan untuk satu tahun tertentu, Selanjutnya membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (lampiran 1) yang digunakan untuk mengetahui selisih antara aset yang dimiliki oleh desa kampung baru padusunan kecamatan pariaman timur kota pariaman sampai tanggal 31 Desember tahun tertentu.

Berdasarkan proses akuntansi selama ini yang dilakukan Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman yaitudalam kekayaan milik desa (Lampiran 1) Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman pada peralatan dan mesin jumlah yang dilaporkan tidak sesuai dengan belanja modal yang terjadi dan juga tidak mengakumulasikan dengan saldo tahun sebelumnya, serta desa juga tidak mengakumulasikan aset tetap lainnya tahun 2018 dengan tahun 2017. Desa kampung baru juga tidak menghitung penyusutan terhadap aset yang dimilikinya, dan desa juga tidak menyajikan jumlah persediaan yang ada seperti persedian benda pos dan material dan persedian alat tulis kantor.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik membahas dan menganalisis masalah penerapan akuntansi dengan melakukan penelitian dalam bentuk proposal berjudul ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA KAMPUNG BARU PADUSUNAN KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN SUMATRA BARAT.

B. PerumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Kesesuaian Penerapan akuntansi pada Pemerintah Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Berdasarkan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

C. TujuandanManfaatPenelitian

Untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Pemerintah Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. diharapkan dapat memberikan manfaat dari penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.Secara akademis: penelitian ini diharapkan menambah wawasan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Akuntansi pada khususnya sebagai bahan referensi tentang kajian evaluasi kegiatan.
- 2.Secara praktisi: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Pemerintah Desa Kapung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, maka penulis membagi kedalam enam bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulis.

BAB II :TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjadi acuan pemahaman teoritis dalam penelitian ini dan hipotesis peneliti.

BAB III :METODE PENEITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, sumber dan jenis penelitian, metode pengumpulan data dan aanalisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum pemerintahan desa, struktur organisasi dan aktivitas yang dijalani pemerintahan desa.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV : **PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Talaah Pustaka

1. Pengertian Desa

Di Indonesia sendiri, desa adalah pembagian wilayah administrative tepat dibawah kecamatan yang dimimpin oleh kepala desa, yang umumnya memiliki panggilan yang berbeda setiap daerah seperti kepala kampung, petinggi, hukum tua, dan lainnya. Biasanya kantor yang digunakan disebut balai desa atau kantor kelurahan .

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 2) pengertian Desa adalah suatu tempat yang distinggali oleh beberapa orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan.

Menurut R.H. UnangSoenardjo (1981: 11) pengertian Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasanya: memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asalusul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Menurut Bastian (2015:8), Ciri-ciri pedesaan antara lain:

- 1. Kepadatan penduduk rendah,
- 2. Kegiatan di pedesaan didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman keras, tanaman tumpang sari, perternakan sapi, kambing, unggas, kolam ikan,
- 3. Masih banyak ditemukan hewan liar seperti burung, tikus, tupai, ular, dan sebagainya,
- 4. Penduduk terkonsentrasi dalam bentuk kluster yang disebut desa,
- 5. Hubungan sosial masyarakat masi sangat akrab dan saling membantu.

Desa merupakan kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahnya sendiri. Masyarakat desa umumnya memiliki kepadatan penduduk yang rendah, penduduknya sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan peternakan. Selain itu masyarakat memiliki hubungan yang akrab dan saling membantu satu sama lain.

Dari beberapa pengertian tentang desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah wilayah dengan batasan-batasan tertentu sebagai kesatuan mayrakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Kewenangan desa adalah:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asalusul desa
- 2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa,

yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

- Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

2. Pengertian Akuntansi

Secara umum akuntansi memiliki 5 prosedur diantaranya adalah pencatatan (recording), pengelompokan (classifying), peringkasan (summarizing), pelaporan (reporting) dan penafsiran (interpreting).

Menurut Suradi (2009 : 2) pengertian akuntansi adalah Suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian akuntansi dari suatu organisasi untuk pihak yang berkepentingan.

Menurut Rudianto (2009:14) pengertian akuntansi adalah proses mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan.

Menurut Rizal Effendi. (2013:1) akuntansi adalah Proses identifikasian, menggukur, mencatatan, menggolongan, dan pengikhtisaran serta melaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada piha-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

America Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan

dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian yang setidaknya bersifat financial dan penafsiran hasil-hasilnya.

Menurut Hery (2012: 102) fungsi Akuntansi adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam Pengambil keputusan".

Dari beberapa pengertian tentang akuntansi menurut para ahli dapat disimpukan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dan pengambilan keputusan.

3. Akuntansi Pemerintah

Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (public finance), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan.

Menurut Deddi nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra (2012:1) akuntansi pemerintah adalah Bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiiki oleh suatu entitas.

Menurut Dwi Martani (2012: 18) standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah Standar akuntansi yang digunakan untuk mrnyusun laporan keuangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Menurut Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi (2012:39) tujuan akuntansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban

Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, serta penilain kinerja pemerintah.

3. Pengawasan.

Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

4. Akuntansi Desa

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunkan pihak-piihak yang berhubungan dengan desa.

Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya adalah:

- 1. Masyarakat desa.
- 2. Perangkat desa.
- 3. Pemerintahan daerah.
- 4. Pemerintahan pusat.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri No 113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa:

1. Anggaran.

Anggaran Desa adalah menyusun keuangan tahunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa untuk dibahas dan disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa untuk satu tahun tertentu.

2. Buku kas umum.

Administrasi pembukuan atau penatausahaan yang dibuat oleh kaur keuangan desa untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran dari keuangan desa yang bersifat tunai.

3. Buku pajak.

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara desa.

4. Buku bank.

Buku yang digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka mengetahui semua penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank.

5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan yang berisi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang akan dibandingkan denggan anggarannya sesuai APBDesa perubahan untuk satu tahun tertentu.

5. Siklus Akuntansi

a. Definisi siklus akuntansi

Menurut Indra Mahardika Putra (2017:126) siklus akuntansi adalah Satu priode dari sebuah pencatatan pembukuan keuangan yang dimulai dari jurnal dan berakhir pada laporan keuangan.

Menurut DinaFitria (2014:28) Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi dalam sebuah perusahaan.

Menurut Carl S. Warren, James M. Reeve dkk (2016:173) siklus akuntansi adalah Proses akuntansi yang dimulai dengan menganalisis dan membuat jurnal untuk transaksi-transaksi dan diakhiri dengan posting ayat jurnal penutup.

Dari beberapa pengertian tentang siklus akuntansi menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi adalah tahapan dari kegiatan akuntansi yang dimulai dengan membuat jurnal dan berakhir pada laporan keuangan hingga jurnal penutup.

b. Tahapan Siklus Akuntansi

Menurut IAI-KASP (2015;12-13) tahapan siklus akuntansi terbagi menjadi:

1. Tahap Pencatatan

Suatu proses mengumpulkan dan mencatat bukti yang disusun kedalam buku harian atau Jurnal Umum.

2. Tahap Penggolongan

Tahap penggolongan merupkan tahap mengelompkkan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan di nilai kedalam debit dan kredit.

3. Tahap penghiktisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapatberfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit. Didalam laporan Kekayaan

Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama, sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu kewaktu untuk menghindari salah pencatatan. Salah satu proses dalam tahap ini adalah melakukan penyesuaian terhadap aset tetap, beban dan pendapatan yang diterima dimuka, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan yang akan diterima.

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir priode anggaran atau pada saat penyusunan laporan keuangan untuk mengoreksi akun-akun tertentu sehingga mencerminkan keadaan aktiva, kewajiban, pendapatan, beban dan modal yang sebenarnya.

Menurut Rudianto (2012:260) penyusutan adalah biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan menjadi beban, sehingga dapat disusutkan selama umur manfaat aset tersebut.

Adapun metode penyusutan aset tetap yang umum digunakan adalah:

1. Metode Garis Lurus

Menurut James, Waren, Jonathan (2010:10) metode garis lurus yaitu menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama setiap tahun selama umur manfaat suatu aktiva tetap.

Misalnya: diasumsikan bahwa biaya akuisisi aset tetap adalah \$20.000, estimasi nilai sisa adalah \$1.000 dan estimasi umur manfaat Adalah 5 Tahun. Penyusutan pertahunnya dihitung sebagai berikut:

Penyusutan pertahun = Biaya – Estimasi Nilai Residu

Estimasi Umur Manfaat

Penyusutan pertahun = \$20.000 - \$1.000

5 Tahun

= \$19.800

2. Metode Saldo Menurun Ganda

Metode Saldo menurun ganda yaitu meghitung beban penyusutan dengan cara mengalikan biaya perolehan dengan persentase tertentu. Tingkat persentase yang digunakan merupakan dua kali lipat dari umur ekonomis metode garis lurus.

3. Metode Unit Produksi

Yaitu menghasilkan beban penyusutan yang sama bagi setiap unit yang diproduksi atau setiap kapasitas yang dihasilkan oleh aktiva.

Misannya: diasumsikan biaya perolehan suatu mesin \$ 20.000, estimasi nilai residu \$1.000 dan diperkirakan memiliki estimasi umur manfaat 5.000 jam operasi. Penyusutan perjam dihitung sebagai berikut:

Penyusutan perjam = Biaya – Estimasi Nilai Residu

Estimasi jam

Penyusutan perjam = \$20.000 - \$1.000

5.000

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini:

a.) Membuat laporan pertangggung jawaban realisasi pelaksanaan APBdesa.

Laporan ini berisi jumlah anggran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutanuntuk tahun anggaran tertentu.

b.) Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

6. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

a. Sistem pencatatan

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012: 44 – 51) sistem pencatatan akuntansi terbagi atas tiga jenis, yaitu sitem pencatatan *single* entry, double entry, dan triple entry.

1.) Single entry
Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata
buku tunggal atau tata buku saja. Alam sistem ini, pencatatan transaksi
ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang
berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan
transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi
pengeluaran.

2.) Double Entry

Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Dalam pencatatan ada sisi debit dan kredit. Sisi debit ada disebelah kiri sedangkan sisi kredit ada disebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3.) Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, pejabat penatausahaan keuanagn (PPK) satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) maupun pada bagian keuangan atau akuntansi pada satuan kerja pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran. inggaran.

b. Dasar Pengakuan Akuntansi

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:54 – 55) terdiri dari:

1.) Basis Kas

Pengakuan pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas.

2.) Basis Akrual

Dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan pristiwa itu terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.) Basis Kas Modifikasian

Basis ini mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4.) Basis Akrual Modifikasian

Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi – transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

7. Penggelolaan keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalammasa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Menurut Abdul Halim dan syam Khusufi (2012: 190) anggaran adalah Pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama priode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkansuatu anggaran

APBDesa pada umumnya adalah pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

APBDesa terdiri dari:

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaanyang melalui rekeningg desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 dan Ayat1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli .
- b. Alokasi dari APBN dalam belanja transfer kedaerah/desa;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah

- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikatdari pihak ketiga;
 dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran ayang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa terdiri atas:

- 1.) Belanja langsung yang terdiri atas;
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja modal
- 2.) Belanja tidak langsung yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai atau penghasilan tetap
 - b. Belanja Subsidi
 - c. Belanja Hibah (Pembatasan Hibah)
 - d. Belanja Bantuan Sosial

- e. Belanja Bantuan Keuangan
- f. Belanja Takterduga

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:

- 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya. Pembiayaaan desa terdiri atas;

- 1. Penerimaan Pembiayaan, yang mencangkup;
 - a.) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
 - b.) Pencairan dana cadangan
 - c.) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
 - d.) Penerimaan pinjaman
- 2. Pengeluaran pembiayaan yang mencangkup
 - a) Pembentukan dana cadangan
 - b) Peryetaan modal desa
 - c) Pembayaran utang

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan, yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah:

"Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa".

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 93 ayat (1) pengelolaan Keauangan Desa adalah :

"Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa".

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

1. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/
 Wali Kota.
- b. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan specimen tandatangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- d. Rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada

 Bupati/Wali Kota.

2. Penatausahaan

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan.
- b. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiriatas: Buku pembantu bank, merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa
- c. Buku pembantu pajak, merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

3. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Berupa Laporan semester pertama terdiri dari: Laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan realisasi kegiatan.

4. Pertanggung jawaban

Sekretaris desa mmenyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan desa tentang pertanggungjawan pelaksanaan APDesa dan keputusan kepala desa disampaikan kepada bupati/ wali kota melalui camat. Waktu penyampain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perturan desa ditetapkan.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.

B. HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah dan talaaah pustaka yang telah diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Penerapan akuntansi keuangan desa yang diterapkan pada Desa Kapung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Baru Padususan kecamatan Pariaman Timur Kota pariaman Sumatra barat.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pemerintah Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman berupa laporan keuangan seperti: laporan kekayaan milik desa, laporan realisasi pelaksanaan anggaran, buka kas umum tunai, buku pajak, dan buku bank.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga berupa informasi mengenai keadaan desa.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

 Teknik Dokumentasi yaitu metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah surat edaran dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 2. Penelitian lapangan yaitu metode ini dilakukan dengan pengamatan terhadap peroses penyusunan akuntansi keuangan daerah (desa) pada Pemerintah Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman serta dilakuakn wawancara dengan bendaharawan dan bagian tatausaha.

D. Teknik Analisi Data

Setelah semua data terkumpul, data tersebut dikelompopkan menurut jenisnya masing-masing dan diuraikan secara deskriptif, yaitu menganalisa data dengan menelaah serta membandingkan dengan teoriteori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk laporan penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA KAMPUNG BARU PADUSUNAN

A. Sejarah Singat Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Sumatra Barat.

Desa Kampung Baru Padusunan adalah suatu yang bersebelahan dengan Desa Kampung Gadang, yang mana pada saat dahulu desa kampung gadang adalah satu desa yang sangat luas wilayahnya yang terdiri dari tanah basah (sawah) dan tanah kering (pemungkiman penduduk), sehingga semua bentuk iuran atau pajak bumi dan bangunan diberikan kedesa Kampung Gadang dan sesuai dengan perubahan masa dan jumlah penduduk sekitar tahu tujuh puluhan desa Kampung Gadang dipecah menjadi satu desa yang baru dengan nama Desa Kampung Baru Padusunan dengan arti kata pada zaman dahulu sesuai dengan penjelasan dari Dt. Majo Biso Suku Mandahiliang (orang tua lama) desa Kampung Baru Padusunan adalah belahan atau pecahan dari Desa Kampung Gadang maka dibentuklah suatu kampung yang baru dengan desa Kampung Baru Padusunan.

B. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk desa kampung baru padusunan adalah 1.217 jiwa dengan komposisi tersaji dalaam tabel berikut:

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Kampung Baru Padusunan

			Pene	duduk		
No	Dusun	KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Dusun	80	171	156	327	
	Pincuran	100	0000	700		
2	Dusun Lb.	67	121	123	244	
	Raya	RSITAS ISLAMRI				
3	Dusun	107	181	202	383	
	Sungkai	7	300	8		
4	Dusun Bula'an	64	131	132	263	
	4 W					
	Total	318	604	613	1.217	

Sumber: Profil Desa Tahun 2018

1. Keadaan Sosial

Kondisi sosial masyarakat desa kampung baru padusunan dapat dilihat dari keadaan sebagai berikut:

Tabel IV.2 tingkat pendidikan

No	Pendidikan			Jumlah	
1	SD/MI			177	
2	SMP / MTS	77	62	1391	
3	SMA /K/MA		139	285	
4	PT / AKADEMI	39	40	79	

Sumber: Profil Desa tahun 2018

Tabel IV.3 Fasilitas sosial

No	Fasilitas	Jumlah
1	Tempat Ibadah:	
	a. Masjid	1 unit
	b. Mushola	5 unit
2	Sekolah:	

a. TK	1 unit
b. Sekolah dasar	1 unit
c. Sekolah Menengah Pertama	0
d. Sekolah Menengah Atas	0
Kesehatan:	
a. Puskesmas Pembantu	1 unit
b. Peuskesmas	
c. Posyandu	
Keamanan:	
a. Poskamling	0
	b. Sekolah dasar c. Sekolah Menengah Pertama d. Sekolah Menengah Atas Kesehatan: a. Puskesmas Pembantu b. Peuskesmas c. Posyandu Keamanan:

Sumber: Profil Desa Tahun 2018

2. Keadaan Ekonomi

Wilayah desa kampung baru padusunan memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan ibu kota dan pusat kegiatan perekonomian, memberikan peluang kehidupan yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal.

Tabel IV. 4 keadaan ekonomi penduduk kampung baru padusunan

No	Uraian Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
A	Kesejahtera <mark>an S</mark> osial			
	1. Keluarga Prasejahtera 1	22	KK	Jumlah KK = 318
				KK
	2. Keluarga Prasejahtera 2	44	KK	
	3. Keluarga Prasejahtera 3	65	KK	
	4. Keluarga Prasejahtera 4	187	KK	
В	Mata Pencarian			
	Petani	48	Jiwa	
	Buruh Tani	60	Jiwa	
	Tukang batu / Kayu	6	Jiwa	
	PNS / Karyawan	109	Jiwa	
	TNI / POLRI	1	Jiwa	
	Pensiun	26	Jiwa	
	Pedangan	10	Jiwa	
	Lainnya	180	Jiwa	

Sumber: Profil Desa Tahun 2018

C. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa Kampung Baru Padusunan merupakan salah desa dalam wilayah kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. Secara administratif, wilayah desa kaampung baru memili batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Sikapak Timur Kecamatan Pariaman Timur

Sebelah Selatan : Desa Kp. Gadang Kecamatan Pariaman Timur

Sebelah Timur : Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur

Sebelah Barat : Desa Cubadak Air Selatan Kecamatan Pariaman

Utara

Luas wilayah Desa Kampung Baru adalah 161 Ha yang terdiri dari 70% berupa pemukiman, 25% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, 5% berupa lahan budidaya perikanan. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Kampung Baru Padusunan mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam setiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar dari pada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah hutan lundung bukit barisan.

1. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Kampung Baru Padusunan dibagi menjadi 4 Dusun. Setiap Dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa di dusun tersebut. Pusat Desa Kmpung Baru Padusunan

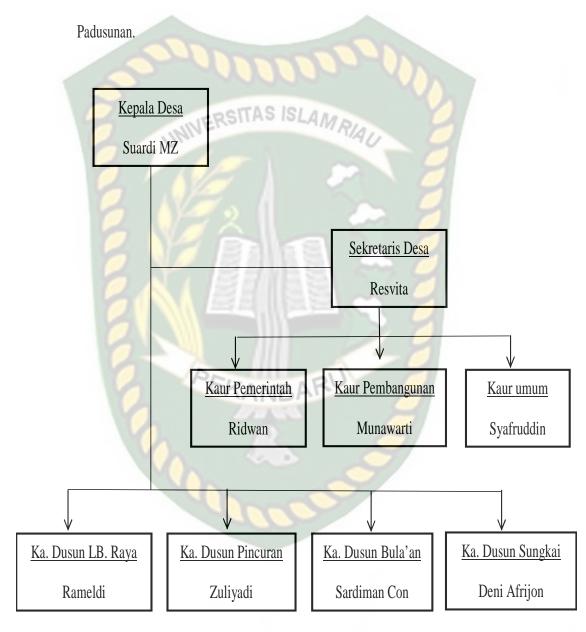
2. Struktur organisasi pemerintah Desa Kampung Baru Padusunan

Struktur organisasi merupakan suatu komponen atau unit – unit kerja yang membantu organisasi dalam mencapai tujuan. Struktur organisasi juga merupakan garis wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antara atasan dengan bawahan dalam suatu organisasi.

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya.

Perangkat Desa terdiri dari satu Sekretaris Desa, tiga orang Kaur dan dua orang Kepala Dusun.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa Kp. Baru



Adapun tugas poko dan fungsi dari masing – masing urusan terinci sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa ayang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Membina kehidupan masyarakat desa
- e. Membina perekonomian desa
- f. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- g. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai peraturan perundang-undangan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan perundangundangan

2. Sekretaris Desa

Dalam membantu kepala desa, sekretaris desa mempunyai tugas ;

- a. Memberikan saran dan pendapat kepaada kepala desa
- Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan unsur teknis lapangan dan unsur pembantu kepala desa
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan desa
- d. Merumuskan program kegiatan kepala desa
- e. Membantu kepala desa dalam penyusunan atau perumusan rancangan peraturan desa
- f. Membantu kepla desa dalam menyusun laporan penyelenggaran pemerintahan desa kepada bupati melalui camat
- g. Menyelenggarakan pengelolaan Buku Administrasi Umum
- h. Melakukan kegiatan administrasi kepegawaian desa
- i. Mengadakan kegiatan inventarisasi
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa
- 3. Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan dalam membantu sekretaris desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk desa
- Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat
 dalam hal pembuatan KTP
- c. Mmelaksanakan kegiatan administrasi usulan naturalisasi
- d. Melaksanakan pencatatan administrasi pertahanan
- e. Melaksanakan pencatatan administrasi monografi desa
- f. Melaksanakan pencatatan kegiatan kemasyarakatan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil
- g. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi kepla desa dan kepentingan kepala desa
- h. Merencanakan penyusunan anggaran penerimaan pengeluaran keuangan desa
- i. Melaksanakan kegiatan administrasi pemilu
- 4. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa
 - Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa
 - c. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memelihara untuk dikembangkan

- d. Melakssanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan gunapembuatan daftar usaha rencana proyek/daftar usaha kegiatan serta mencatat daftar isian proyek
- e. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (KUD, perkreditan dan lembaga perekonomian lainnya)
- f. Mengikuti dan melaporakan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya
- g. Melaksanakn pencatatan megenai tera ulang dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan ijin usaha, ijin bangunan dan lain-lain

5. Kepala Urusan Umum

- a. Menerima dan mengendalikan surat masuk dan keluar, serta melaksanakan tata kearsipan
- b. Melaksanakan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat serta hasil lainnya
- Melaksanakan penyediaan, pemyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor, serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- d. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembagan pelaksanaan piket

- e. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor serta bangunan lain milik desa
- f. Melaksanakan kegiatan kemasyrakatan termasuk kegiatan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat (LINMAS)
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

 Tugas-tugsa maksimal 3 seksi lainnya yang disesuikan dengan situasi dan kondisi desa yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi bidang kesejahteraan rakyat, pelaksanaan perkembangan perekonomian di desa dan pelaksanaan pembangunan di desa

6. Kepal Dusun

Kelapa Dusun adalah unsur pembantu kepala desa diwilayah kerja dusun, bertugas untuk membantu kepala desa diwilayah kerja dusun dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

D. Visi dan Misi Desa Kampung Baru Padusunan

1. Visi Desa Kampung Baru Padusunan

Berdasarkan analisis terhadap kondisi objektif dan potensi yang dimiliki Desa Kampung Baru Padusunan dengan mempertimbangkan kesinambungannya, maka visi Desa Kampung Baru Padusunan adalah mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera dan berkualitas dibidang agama, sosial olahraga dan budaya serta peningkatan pelayanan kepada masyrakat yang baik.

Visi tersebut memiliki 4 (empat) pokok pikiran yang diuraikan sebagai berikut :

- SEHAT, yaitu mengembangkan pembangunan gedung olah raga untyk menghasilkan da melahirkan bibit baru untuk aktif berolah raga.
- 2) SEJAHTERA, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Kampung Baru Padusunan yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik dengan penigkatan industri dan kerajinan.
- 3) AGAMA, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakan Desa Kampung Baru Padusunan yang memiliki akhlak mulia dengan meletakan pondasi agama sebagai landasan dalam berfikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan.
- 4) SOSIAL, yaitu kondi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sumber daya manusia yang menjunjung tinggi rasa gotong royong.
- 5) BUDAYA, yaitu meningkatkan dan mengambarkan budaya tradisional seperti silat, dan gandang tasadan galombang.

2. Misi Desa Kampung Baru Padusunan

Untuk mencapai visi mewujudkan masyarakat sehat, sejahtera yang religius dan intelektual melalui peningkatan sikap kegotong royongan dan peningkatan rasa kegotong royongan tersebut, desa kampung baru padusunan telah menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan anak-anak yang berkualitas dengan hidup berolah raga sehingga anak-anak desa tersebut akan terhindar dari kegiatan negatif.
- b. Mewujudkan perekonomian masyrakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal.
- c. Meningkatan ketersediaan dan kualitas insfrastruktur dan sarana umum.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia dengan meningkatkan tahfiz al-qur'an .
- e. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan .
- f. Memfasilitasi pembangunan dan peningkatan rasa kebersamaan yang tinggi.
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang penerapan Sistem Akuntansi pada Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timut Kota Pariaman dari data yang didapat, maka penulis akan menganalisa tentang Sistem Akuntansi yang telah disusun oleh Desa Kampunmg Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, yaitu sebagai berikut:

A. Dasar Pengakuan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

Pengakuan adalah menentukan kapan suatu transiksi dicatat, untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan beberapa basis/dasar pengakuan akuntansi. Dasar pengakuan akuntansi pada kampung baru padusunan menggunakan *Chas Basis* yaitu pada proses pencatatan transaksi dicatat pada saat penerimaan kas atau pada saat kas dikeluarkan.

B. Siklus Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Kampung Bru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

Proses Akuntansi yang dilakukan Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman yaitu dimulai dari transaksi baik itu penerimaan maupun pengeluaran kas dicatat di buku Kas Umum Tunai yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas, Buku Bank Desa yang berguna untuk semua penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang Bank,

selanjutnya Buka Kas Pembantu Pajak yaitu untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajakyang dilakuan oleh bendahara desa.

Setelah dilakukan proses penatausahaan pada akhir priode Desa Kampung Baru Padusunan juga membuat laporan keuangan desa yang berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang akan dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa perubahan untuk satu tahun tertentu, selanjutnya desa kampung baru padusunan membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang digunakan untuk mengetahui selisih antara aset yang dimiliki oleh Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman sampai tanggal 31 Desember tahun tertentu.

Berdasarkan siklus Akuntansi yang dilakukan Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman dalam Kekayaan Milik Desa, Desa Kampung Baru Padusunan tidak menghitung penyusutan tehadap aset yang dimilikinya, dan desa juga tidak menyajikan jumlah persediaan yang ada seperti alat tulis kantor.

1. Buku kas umum

Disetiap transaksi yang terjadi baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, bendahara Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur langsung mencatatnya kedalam buku kas umum. Beberapa tansaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dilakukan Desa Kampung Baru Padusunan sebangai berikut:

CP	
bearing of	
~	
4000	
process	
CO	
GP2	
-	
-	2000
0.0	
polar	-
	-
The state of	Segment
	No. of
20	
-	
6/0	possel
22	
-	
3	400
	- (2)
part of	house
\sim	-
0.00	
$\overline{}$)
)
	posterio
(man)	
	20,00
lumi o	200
-	poor
7	
Į.	0
Į.	0.5
ive	102
ive	lan
ive	ldala
iver	10212
iver	ldala
ivers	10212
ivers	Idalar
iversi	idalan
iversi	idalah A
iversit	idalan
iversit	idalah A
iversita	idalah Ar
iversita	idalah Ar
iversita	idalah Ars
iversitas	idalah Ar
iversitas	idalah Arsi
iversitas	idalah Ars
iversitas]	idalah Arsi
iversitas I	idalah Arsi
ersitas I	idalah Arsip I
ersitas I	idalah Arsip M
iversitas Is	idalah Arsip I
ersitas I	idalah Arsip M
ersitas I	idaian Arsip Mi
ersitas I	idaian Arsip Mil
ersitas I	idaian Arsip Mili
ersitas I	idaian Arsip Mil
ersitas Islar	idaian Arsip Mili
ersitas Islar	idaian Arsip Milli
ersitas I	idaian Arsip Milli
ersitas Islar	idaian Arsip Milli
ersitas Islar	idaian Arsip Milli
ersitas Islar	idaian Arsip Milli

06 Juni 2018	Penerimaan ADD untuk Pembayaran Staf Kades Dan Desa
	sebesar Rp. 180.000.000
08 Juni 2018	Pembayaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
	sebesar Rp. 51.750.000
08 Juni 2018	Pembayaran Tunjangan BPD sebesar Rp. 20.000.000
24 Juli 2018	Penerimaan ADD sebesar Rp. 250.000.000
13 Agustus 2018	Pembelian ATK sebesar Rp. 1.600.000
	Bentuk Buku Kas Umum Desa Kampung Baru Padusunan
	Pada Tabel Berikut:

Tabel V.1 Buku Kas Umum Pemerintahan Desa Kampung Baru Padusunan Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	R ek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	No Bukti	Pengeluaran kumulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	+	3	0	,	0	9
1	06/06/2018		TUNAI Kas Dibendahara	180.000.000	SLAMRIA	0002/ CASH /04.03 /2018	0	180.000.000
2	08/06/2018		Pembayaran Siltab Perangkat desa Kas diBendahara	0	51.750.000	0001/ SPP/0 4.03/2 018	51.750.000	128.250.000
3	08/06/2018		Pembayaran Tunjangan BPD Kas Dibendahara	0	20.000.000	0008/ SPP/0 4.03/2 018	71.750.000	108.250.000
4	24/07/2018		TUNAI Kas diBendahara	250.000.000	ARU	0004/ CASH /04.03 /2018	0	328.250.000
5	13/08/2018	V	ATK (BPD) Kas diBendahara	0	1.600.000	0024/ SPP/0 4.03/2 018	1.600.000	356.650.000

Sumber: Desa Kampung Baru Padusunan 2018

a. Buku Besar

Setelah semua transaksi dilakukan pencatatan kedalam Buku Kas Umum Tunai seharusnya Desa Kampung Baru Padusunan juga memposting ke dalam Buku Besar Seperti Tabel V.2 sampai dengan V.5

Tabel V.2
Buku Besar Desa Kmpung Baru Padusunan
Tahun anggaran 2018

Kas

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (RP)	Saldo (Rp)
01/06/2018	Saldo awal	(1)		3 9	
06/06/2018	Penerimaan		180.000.000		
	kas			A 2	
08/06/2018	Pengeluaran	B.	MEEL	51.750.000	
	kas	100	100	9	
08/06/2018	Pengeluaran		11111	20.000.000	
	kas	EKI	MIDARU		
24/07/2018	Penerimaan	-11/-	250.000.000		
	kas		A)		
13/08/2018	Pengeluaran		40	1.600.000	356.650.000
	kas	\			

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Kampung Baru Padusunan sebesar Rp. 180.000.000 dan Rp. 250.000.000 seharusnya dicatat dalam buku besar sesuai dengan akunnya. Seperti tabel V.3 berikut :

Tabel V.3 Buku Besar Desa Kampung Baru Padusunan Tahun Anggaran 2018

Alokasi Dana Desa

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/06/2018	Saldo Awal				
06/06/2018	Penerimaan Kas	PSI	TAS ISLAM	180.000.000	180.000.000
24/07/2018	Pengeluaran Kas			250.000.000	430.000.000

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

Tabel V.4 Buku Besar Desa Kampung Baru Padusunan Tahun Anggaran 2018

Belanja Pegawai

Detailla i egawai								
Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)			
01/06/2018	Saldo Awal			-5				
08/06/2018	Pengeluaran Kas	EKA	51.750.000	9	51.750.000			
08/06/2018	Pengeluaran Kas		20.000.000	9	71.750.000			
13/08/2018	Pengeluaran Kas		1.600.000		73.350.000			

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

Tabel V.5 Buku Besar Desa Kampung Baru Padusunan Tahun Anggaran 2018

Belania Bahan Pakai Habis (ATK)

Delanja Banan Fakai Habis (ATK)									
Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit	Saldo (Rp)				
66			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Rp)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
				(Kp)					
13/08/2018	Bayar Belanja		1.600.000		1.600.000				
	Bahan Pakai								
	Habis Kantor								
	(ATK)	CITAS	ISLAMRIA						
The state of the s	MIER	DIIMO	INDIAND.						
	· IMIA		11/4						
	7.7								

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

b. Neraca Saldo

Setelah semua transaksi di posting kebuku besar, maka tahap selanjutnya membuat Neraca Saldo. Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur membuat Neraca Saldo sebagai berikut pada tabel V.6

Tabel V.6
Neraca Saldo Desa Kampung Baru Padusunan (Sebagian)
Tahun Anggaran 2018

1 and 1 m 5 and 2010				
Tanggal	Uraian	J umlah		
		Debit	Kredit	
31/12/2018	Kas	Rp. 39.408.964		
1	Pendapatan Transfer		Rp. 430.000.000	
	Belanja <mark>Pega</mark> wai	Rp. 73.350.000		
	Bahan Dipakai Habis	Rp.1.600.000		

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

2. Buku Bank

Dalam setiap penerimaan dan pengeluaran uang yang berhubungan dengan uang Bank Desa Kampung Baru Padusunan talah Penyajian Buku Bank Desa sesuai dengan peraturan Permendagri No 113 tahun 2014 yaitu pada tabel V.7

Tabel V.7
Buku Bank Desa Kampung Baru Padusunan
Tahun Anggaran 2018

N.	o Tgl Uraian Transaksi No Bukti Pemasukan Pengeluaran								
No	Igl	Uraian Transaksi	NO BUKTI	Pema	sukan	Peng	eluaran		
No.	Tonggol	Liunian Tuanaaksi	No Dukt	Catavan/Da)	Dungo (Dn)	Danarikan/Da)	Pajak	B.Admi	
No	Tanggal	Uraian Transaksi	INO BUKU	Setoran(kp)	Bunga(Rp)	Penarikan(Rp)	(Rp)	n(Rp)	Saldo(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0002/TBP	X III			4		
	100	ADD dan DD	/04.03/20				4		
1	6/6/2018	tahap I	18	335.051.685					335.051.685
	10		0002/CAS			46	4		
		Pengambilan Pengambilan	H/04.03/				47		
2	6/6/2018	Uang di Bank	2018			180.000.000	47		180.000.000
			0008/TBP		110	1			
		5	/04.03/20	KANB	ARU	3-1			
3	30/11/2018	Jasa Bunga Bank	18	Bulli	106.012	-			106.012

Sumber: Desa Kampung Baru Padusunan 2018

3. Buku Kas Pembantu Pajak

Untuk semua transaksi yang berhubungan dengan pemungutan maupun penyetoran pajak yang dilakukan Desa Kampung Baru Padusunan telah membuat Buku Kas Pembantu Pajak yang telah sesuai dengan Peraturan Permendagri No 113 tahun 2014 pada Tabel V.8

Tabel V.8 Buku Kas Pembantu Pajak Desa Kampung Baru Padusunan Tahun Anggaran 2018

			Potongan	Penyetoran	Saldo
No	Tangga I	Uraian	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	16/06/2018	00103/KTW/04.03/2018 Pembelian98 zak Semen Untuk Pembangunan drainase dusun Bula'an		67	
		PotonganPajakPPNPusat	627.200	0	627.200
	8	PotonganPajakPPhPasal22	94.080	0	94.080
2	25/06/2018	O0061/KWT/04.03/2018 Pembayaran Pembelian Pakaian Seragam Anak Didik Paud Seperti Faktur Terlampir PotonganPajakPPNPusat	772.727 115.909	0 0	772.727 115.909
3	28/07/2018	00132/KWT/04.03/2018 Pembelian 4TV Untuk Sarana Poskamling desa Kampung Baru Padusunan PotonganPajakPPh Pasal 22 Potongan Pajak PPN Pusat	190,909 1.272.727	0 0	190.909 1.272.727
4	06/08/2018	00377/KTW/04.03/2018 Pembelian 1,48 M3 Blok Kayu Potongan Pajak PPh Pasal 22	80.727	0	80.727
		Potongan Pajak PPN Pusat	538.182	0	538.182

Sumber: Desa Kampung Baru Padusunan 2018

c. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan akun yang mengalami perubahan terhadap saldo yang dimiliki. Tetapi Desa Kampung Baru Padusunan tidak membuat jurnal penyesuain karna tidak berpedoman pada Akuntansi Berterima Umum. Adapun transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian antara lain:

1. Bahan <mark>Hab</mark>is Pakai (ATK)

Perlengkapan merupakan barang yang di gunakan untuk kegiatan operasional desa yang habis dipakai yaitu hanya bisa digunakan sekali atau dalam waktu singkat. Bahan Habis Pakai merupakan salah satu akun yang harus dilakukan penyesuaian terhadap saldo yang dimiliki, karena bahan habis merupakan aset lancar yang kegunaanya kurang dari satu tahun.

Desa Kampung Baru Padusunan akan melakukan pengecekan fisik terhadap persediaan yang dimiliki desa pada setiap akhir priode, namun dalam pegecekan tersebut desa Kampung Baru Padusunan tidak melakukan penyesuaian terhadap persediaan yang dimilikinya, sehingga dalam laporan kekayaan milik desa nilai persediaan yang disajikan 0. Hal ini dikarenakan bagi desa kampung baru padusunan persediaan seperi alat tulis kantor (ATK) merupakan suatu benda yang fisiknya kecil dan tidak perlukan dilakukan perhitungan terhadap nilai sisa persediaan tersebut. Sehingga dampak dari tidak dilakukannya penyesuaian terhadap nilai persediaan pada akhir tahun akan mengakibatkan nilai persediaan terlalu rendah dalam laporan kekayaan milik desa.

Berikut adalah contoh perhitungan persediaan Bahan Habis Pakai yang seharusnya dibuat oleh Desa Kampung Baru Padusunan:

13 Agustus 2018 Bayar Belanja

Bayar Belanja Bahan Habis Pakai Kantor

(ATK) sebesar Rp. 1.600.000

13/08/2018 Persediaan Alat Tulis Kantor

Rp. 1.600.000

Kas dibendahara

Rp. 1.600.000

Kemudian pada akhir tahun 2018 setelah dilakukan pengecekan fisik diasumsikan bahwa jumlah persediaan yang tersisa berupa kertas HVS senilai Rp. 120.000 dan 1 botol Tinta Printer senilai Rp. 80.000 sehingga jumlah pesediaan yang terpakai selama tahun 2018 sebesar Rp. 1.400.000. Maka seharusnya Desa Kampung Baru Padusunan membuat jurnal Penyesuaian sebagai berikut :

13/08/2018 Belanja Alat Tulis Kantor Rp. 200.000

Persediaan Alat Tulis Kantor

Rp. 200.000

2. Penyusutan Aset Tetap

Aset Tatap adalah kekayaan yang dimiliki untuk dipakai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Aset Tatap merupakan salah satu akun yang harus juga dilakukan perhitungan penyusutan. Akan tetapi Desa Kampung Baru Padusunan tidak melakukan perhitungan dan membuat jurnal penyesuaian terhadap aset tetapnya berupa Peralatan dan mesin, gedung dan Bangunan, serta jalan dan instalasi.

Berikut adalah contoh perhitungan Penyusutan terhadap aset yang dimiliki oleh desa kampung baru padusunan dengan menggunakan Metode garis lurus :

a.) Penyusutan peralatan dan mesin

Harga perolehan : Rp. 145.919.950

Umur ekonomis : 5 Tahun

Metode penyusutan : Garis Lurus

Penyusutan pertahun = Rp. 145.919.950

5 Tahun

= Rp. 29.183.990

b.) Penyusutan Gedung dan Bangunan

Harga perolehan : Rp. 426.799.950

Umur ekonomis : 10 Tahun

Metode penyusutan : Garis Lurus

Penysutan pertahun = Rp. 426.799.950

10 Tahun

= Rp. 42.679.995

c.) Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi

Harga perolehan : Rp. 463.587.900

Umur ekonomis : 10 Tahun

Metode penyusutan : Garis Lurus

Penysutan pertahun =
$$\frac{\text{Rp. }463.587.900}{20 \text{ ahun}}$$

Setelah menghitung penyusutan aset tetap, selanjutnya Desa Akmpung Baru Padusunan membuat ayat jurnal penyesuaian sebagai Berikut :

a.) Jurnal peralatan Dan mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Rp. 29.183.990

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Rp. 29.183.990

b.) Jurnal Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Rp. 42.679.995

Akumulasi Penyustan Gedung dan Bnagunan

Rp. 42.679.995

c.) Jurnal Jalan, Jaringan dan Instalasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalsi

Rp. 46.358.790

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 46.358.790

d. Jurnal Penutup

Pada dasarnya jurnal penutup merupakan bagian dari siklus akuntansi keuangan daerah, akan tetapi Desa Kampung Baru Padusunan belum menyaikannya. Berikut ini jurnal penutup yang seharusnya dibuat oleh Desa Kampung Baru Padusunan pada tabel V.9

Tabel V.9
Jurnal Penutup
Desa Kampung Baru Padusuna

Tanggal	Uraian Uraian	Jumlah		
		Debit	Kredit	
31/12/2018	Jurnal Penutup untuk Pendapatan Pendapatan Transfer Ikhtisar Surplus/Defisit	Rp. 430.000.000	Rp. 430.000.000	
	Jurnal Penutup untuk Biaya Ikhtisar Surplus/Defisit Belaja Pegawai Belanja Bahan dipakai Habis	Rp. 74.950.000	Rp. 73.350.000 Rp. 1.600.000	

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

C. Penyajian Laporan Keuangan Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman

Penyajian laporan keuagan yang dilakukan Desa Kampung Baru Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Sumatera Barat telah sesuai dengan Peraturan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Pedoman asistensi Ikatan Akuntan Indosnesia KASP. Dalam penyajian Laporan Keuangan Desa Kampung Baru Padusunan menyajikan Laporan Realisasi Pelaksanaa Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDesa yaitu Laporan yang berisi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang akan dibandingakan anggarannya sesuai dengan APBDesa perubahan untuk satu tahun tertentu. Penyajian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDesa yang dilakukan DEsa kampung Baru Padusunan Telah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Pedoman Asistensi Ikatan Akuntan Indosnesia KASP.

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa yaitu untuk mengetahui selisih antara aset yang dimiliki desa sampai tanggal 31 Desember tahun tertentu, desa kampung baru padusunan tidak menyusun laporan kekayaan milik desa sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum, yang mana seharusnya desa kampung baru padusunan pada laporan kekayaan milik desa harus menyajikan jumlah persediaan seperti persediaan benda pos dan material dan persediaan alat tulis kantor, dan desa kampung baru padusunan juga tidak mebuat akumulasi penyusutan pada aset yang dimiliki serta untuk aset tetap peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jarringan, dan Instalasi sudah diakumulasikan antara aset tahun 2017 dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Peralatan dan Mesin tahun 2017	Rp. 69.363.200
	Belaanja Modal Tahun 2018	Rp. 76.556.750
	Total Tahun 2018	Rp. 145.919.950
b.	Gedung dan Bangunan tahun 2018	Rp. 391.698.650
	Belanja Modal tahun 2018	Rp. 35.101.300
	Total Tahun 2018	Rp. 426.799.950
c.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	Rp. 290.863.400
	Belanja Modal tahun 2018	Rp. 172.724.500
	Total Tahun 2018	Rp. 463.587.900

Akan tetapi untuk aset tetap lainnya desa tidak mengakumulasikan antara tahun 2017 dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut

Aset Tetap lainnya tahun 2017	Rp. 36.980.000
Bel <mark>anja M</mark> odal <mark>Ta</mark> hun 2018	Rp. 10.800.000
Tolal aset tetap lainnya yang seharusnya	a Rp. 47. <mark>780</mark> .000

Berikut tabel yang seharusnya dibuat oleh desa Seperti Tabel V. 10

Tabel V.10 Laporan kekayaan Milik Desa Desa Kampung Baru Padusunan

Tahun 2018	Tahun 2017
2010	
Rn 336 808 823	
	Rp. 143.240.428
	149. 1 13.2 10. 120
-AMD	
NAI,	
-40	
MA I	
Rp. 480.049.251	Rp. 143.240.428
1,700	
	5 40 0 40 000
Rp. 145.919.950	Rp. 69.363.200
(Rp. 29.183.990)	
D 426 700 050	
	D 201 600 650
(Kp. 42.679.995)	Rp. 391.698.650
Dr. 462 597 000	
Kp. 403.387.900	
(Rn 46 358 790)	Rp. 290.863.400
(1tp. To. 330. 170)	Kp. 270.003.400
Rp. 47.780.000	Rp. 36.980.000
	Rp. 788.905.250
	Rp. 932.145.678
	-tp: >02.1 10.070
D 1 445 014 076	D 022 147 470
I Rn I 445 914 776	Rp. 932.145.678
	Rp. 336.808.823 Rp. 143.240.428 Rp. 480.049.251 Rp. 426.799.950 (Rp. 426.799.95) Rp. 426.799.95) Rp. 463.587.900 (Rp.46.358.790) Rp. 47.780.000 Rp. 965.865.025 Rp. 1.445.914.276

Sumber: Data Olahan Penulis 2019

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.

A. Kesimpulan

- 1. Dalam Dasar Pencatatan Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur Kota pariaman menggunakan *Cash Basis*, yaitu setiap transaksi dicatat pada saat menerima atau mengeluarkan kas.
- 2. Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur tidak melakukan proses pemostingan dari Buku Jurnal ke dalam Buku Besar yang berfungsi untuk meringkas semua data transaksi.
- 3. Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur tidak membuat Neraca Saldo. Neraca Saldo dibuat untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit.
- 4. Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur tidak membuat jurnal penyesuaian, terhadap penyusutan aset tetap dan bahan habis pakai.
- 5. Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur tidak membuat jurnal penutup.
- 6. Laporan Kekayaan Milik Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum karena tidak mencatat saldo akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.
- 7. Proses Akuntansi pada Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

B. Saran

- Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur sebaiknya melakukan proses pemostingan ke Buku Besar agar memudahkan menyusun informasi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan.
- Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur sebaiknya membuat
 Neraca Saldo agar mengetahui keseimbangan antara debit dan kredit.
- 3. Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur sebaiknya melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap dan Bahan Habis Pakai agar informasi saldo akun aset tetap menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
- 4. Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur sebaiknya membuat jurnal penutup agar menyajikan informasi keuangan yang aset desa.
- 5. Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur sebaiknya mencatat saldo akun akumulasi penyusutan aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa agar mengetahui keadaan yang sebenarnya.
- Desa Kampung Baru Padusunan kecamatan Pariaman Timur sebaiknya berpedoman pada Akuntansi Berterima Umum tentang Siklus Akuntansi dalam mengelola keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk kecamatan dan desa. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. <u>Akuntamnsi Keuangan Daerah.</u> Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. 2012. <u>Akuntansi Sektor Publik</u>. Jakarta. Salemba Empat.
- Hery. 2012. Akuntansi Dan Rahasia Dibaliknya Untuk Para Manajer Non-akuntansi. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Martani, Dwi, Nps Sylvia Veronika, dkk. 2012. <u>Akuntansi Keuangan</u> <u>Menengah Berbasis PSAK</u>. Jakarta. Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi, dkk. 2008. <u>Akuntansi Pemerintahan</u>. Jakarta, Salemba Empat
- Nurcholis, Hanif. 2011. <u>Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahaan desa</u>: Erlangga.
- Putra, Indra Mahardika. 2017. <u>Pengantar Akuntansi.</u> Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Rudianto. 2009. Pengantar Akuntansi. Jakarta: PT.Gelora Aksara Pratama.
- Suradi. 2009. Akuntansi Pengantar. Yogyakarta: Gava Media.
- Warren, Carls, Reeve, James M, dkk. 2016. <u>Pengantar Akuntansi</u>. Jakarta. Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 <u>Tentang</u> <u>Pengelolaan Keuangan Desa.</u>
- Ikatan Akuntan Indonesia , Kompartemen Akuntan Sektor Publik. 2015. Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.